

**PERAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Tesis

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik



DIAJUKAN OLEH:

KRISNALDO TRIGUSWINRI
14020119410005

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2023

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan kemudian disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang. 27 Juni 2023

Krisnaldo Triguswinri

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

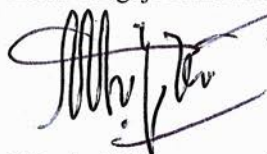
Dipersiapkan dan disusun oleh:

KRISNALDO TRIGUSWINRI
14020119410005

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 27 Juni 2023

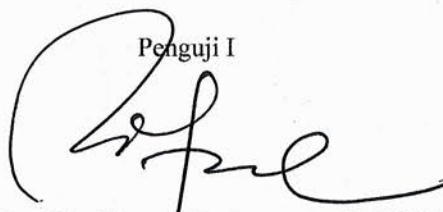
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji/Pembimbing I



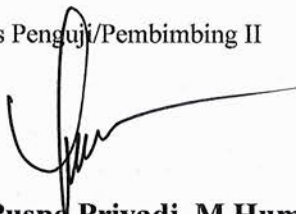
Dr. Hartuti Purnaweni, MPA
NIP. 19611202.198803.2.002

Penguji I



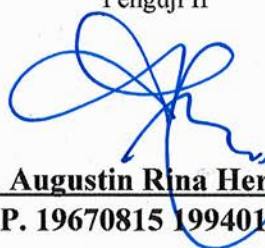
Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M
NIP. 19670819 199403 2 003

Sekretaris Penguji/Pembimbing II



Dr. Budi Puspo Priyadi, M.Hum
NIP. 19600819.199001.1.001

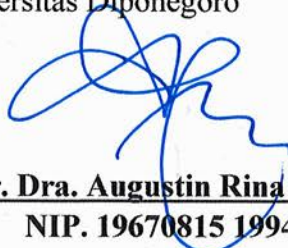
Penguji II



Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si
NIP. 19670815 199401 2 001

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik

Semarang, 27 Juni 2023
Ketua Prodi Magister Administrasi Publik
Universitas Diponegoro



Dr. Dra. Augustin Rina Herawati, M.Si
NIP. 19670815 199401 2 001

buat Mama dan Papa:
selamat 27 tahun pernikahan.

RINGKASAN

Komnas Perempuan berdasarkan data yang dilaporkan oleh masyarakat dan mahasiswa korban pelecehan dan kekerasan seksual menyebutkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah kekerasan seksual terbesar nomor dua setelah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan di dunia universitas masih terjadi karena minimnya internalisasi pengetahuan berbasis gender dan tidak adanya payung hukum yang bisa digunakan sebagai salah satu bentuk preventif dalam menanggulangnya. Minimnya pengetahuan berbasis gender di dalam perguruan tinggi dan nihilnya aturan tentang pencegahan kekerasan seksual membuat Komnas Perempuan melakukan konsolidasi yang melibatkan kampus-kampus di Indonesia untuk melakukan peninjauan terhadap kondisi pelecehan dan kekerasan seksual di universitasnya masing-masing.

Komnas Perempuan juga melakukan konsolidasi dengan melibatkan kelompok agama dan masyarakat sipil dalam mendiskusikan isu ini untuk kemudian direkomendasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia demi dihasilkannya institusionalisasi pelecehan dan kekerasan seksual dalam bentuknya yang kebijakan. Komnas Perempuan juga melakukan langkah aktif dan melakukan pemantauan terhadap kampus - kampus seluruh Indonesia dan bagaimana cara mereka menangani kasus pelecehan dan kekerasan yang terjadi. Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa hanya sedikit sekali kampus yang memiliki peraturan tentang kekerasan seksual dan banyak sekali kampus yang tidak memiliki peraturan.

Permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual ini menjadi sesuatu yang baru memang sehingga banyak sekali kampus yang bereputasi di Indonesia yang justru permisif terhadap fenomena tersebut. Hal tersebut juga yang menjelaskan mengapa Komnas Perempuan mendorong rektor-rektor di seluruh Indonesia agar punya komitmen yang jelas dan terlibat langsung dalam menyelesaikan permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual di universitasnya masing-masing.

Kampus yang menjadi lokasi diproduksinya ilmu pengetahuan dan ekosistem yang emansipatif bagi para pendidik dan terdidik ternyata tidak terlepas dari permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual. Pada tahun 2019 Komnas Perempuan melakukan survei yang melibatkan 16 Perguruan Tinggi di Indonesia dan menemukan 1.011 kasus kekerasan seksual di dalam kampus. Gabungan media juga melakukan riset *investigative* dengan melibatkan 79 universitas dan menemukan 174 kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Tempo juga melaporkan bahwa dari hasil riset yang dilakukan oleh Kemendikbud terdapat

temuan sebanyak 77% kasus kekerasan seksual di kampus dan 60% dari korbannya tidak melaporkan kasusnya.

Hal di atas terjadi karena ketiadaan hukum yang mengatur kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga tiadanya komitmen universitas untuk menyelesaikannya karena menganggap bahwa hal tersebut harus ditutupi karena akan mencoreng nama baik universitas. Padahal menurut Komnas Perempuan, nama baik kampus sebagai indikator tidak adanya kekerasan seksual itu adalah konstruksi sosial. Kampus harus memiliki konstruksi baru untuk mengatakan bahwa indikator yang baik sebagai ukuran berkualitas dari sebuah kampus adalah kampus yang memiliki peraturan yang berkenaan dengan masalah kekerasan seksual dan kampus yang bisa menyelesaikan kasusnya serta memberikan perlindungan dan konseling kepada mereka yang menjadi penyintas kekerasan dan pelecehan seksual. Sehingga dengan indikator semacam itu dengan sendirinya kampus yang dianggap sebagai ruang pembentukan karakter dan intelektual para mahasiswa akan mendapatkan persepsi yang baik dari semua kalangan. Ketidadaan hukum di dalam perguruan tinggi yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus membuat Komnas Perempuan resisten mendorong pemerintah untuk segera merancang kebijakan yang dapat menjadi payung hukum demi mencegah pelecehan dan kekerasan tersebut.

Peran Komnas Perempuan di dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terbilang sangat signifikan. Kerja-kerja sosial dan intelektual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di dalam memberikan pengadvokasian kepada pinyintas kekerasan; melakukan kajian dan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data dan laporan; penyelenggaraan diskusi publik, kampanye, sosialisasi dan edukasi yang berkenaan dengan fenomena kekerasan; serta konsolidasi yang diinisiasi Komnas Perempuan dengan melibatkan keterlibatan universitas, organisasi masyarakat sipil, kelompok agama dan pemerintah membuahkan hasil yang krusial dan masimal.

Komnas Perempuan berhasil mendorong Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Kementerian Agama membuat kebijakan penghapusan kekerasan seksual tersebut yang dapat digunakan di universitas umum dan universitas berbasis agama di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan berhadap dengan adanya kebijakan tersebut angka pelecehan dan kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan tinggi dapat dihapuskan dan para korban memiliki penjaminan atas dipulihkannya hak-haknya sebagai penyintas serta potensi seseorang yang ingin melakukan pelecehan dan kekerasan tersebut dapat dibatalkan karena berlakunya kebijakan ini.

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran Komnas Perempuan di dalam Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan menggunakan konsep-konsep yang berkorelasi dengan teori peranan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komnas Perempuan mengambil peranan yang sangat signifikan di dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peran tersebut termanifestasi melalui kerja-kerja sosial dan intelektual yang dilakukan oleh Komnas Perempuan di dalam memberikan pengadvokasian kepada pinyintas kekerasan; melakukan kajian dan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data dan laporan; penyelenggaraan diskusi publik, kampanye, sosialisasi dan edukasi yang berkenaan dengan fenomena kekerasan; serta konsolidasi yang diinisiasi Komnas Perempuan dengan melibatkan keterlibatan universitas, organisasi masyarakat sipil, kelompok agama dan pemerintah dalam mendorong institusionalisasi kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam bentuknya yang kebijakan. Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu, kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini dapat menjadi payung hukum untuk penghapusan segala bentuk kekerasan seksual di kampus dan dengan demikian kampus terbebas dari permasalahan pelecehan dan kekerasan seksual.

Kata Kunci: Komnas Perempuan, Peran, Kebijakan Kekerasan Seksual

ABSTRACT

The aim of this research is to see how the National Commission on Violence Against Women plays a role in the Policy on Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education or college by using concepts that correlate with role theory. The method used in this study is a qualitative method, with the data collection techniques in the form of interview. The results of this study indicate that Komnas Perempuan or The National Commission on Violence Against Women plays a very significant role in Permendikbud No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education or college Environments. This role is manifested through the social and intellectual works carried out by The National Commission on Violence Against Women in advocating for survivors of violence; conducting studies and field research in the context of collecting data and reports; organizing public discussions, campaigns, outreach and education related to the phenomenon of violence; and the consolidation initiated by The National Commission on Violence Against Women involving the involvement of universities, civil society organizations, religious groups and the government in encouraging the institutionalization of sexual violence in tertiary institutions in the form of policy. The conclusion of this research is that the policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education can become a legal umbrella for eliminating all forms of sexual violence on a campus and thereby freeing the campus from problems of sexual harassment and violence.

Keywords: The National Commission on Violence Against Women, Role, Sexual Violence Policy

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan Tesis ini yang berjudul "PERAN KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI" sebagai syarat menyelesaikan Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan dan ketulusan hati, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Mama dan Papa serta Pandhu Pramudya Triguswinri yang sudah memberikan cinta kasih, dukungan moral serta materil sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Hartuti Purnaweni, MPA dan Dr. Budi Puspo Priyadi, M. Hum yang dengan kebaikan hati serta kesabarannya mendidik, membimbing dan banyak memberikan saran serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Ida Hayu Dwimawanti, M.M dan Dr. Dra. Agustin Rina Herawti, M.Si selaku penguji yang telah bersedia menguji serta memberikan kritikan dan masukan sehingga tesis ini dapat disempurnakan.
4. Pak Ratno dan Pak Suwardi yang sudah membantu proses administrasi dari penerbitan surat izin penelitian, seminar proposal, seminar hasil hingga sidang akhir tesis.
5. Rekan-rekan MAP 51, Andy Priyonggo, Satria Adhi Pradhana, Heesam Dorni, Al-Adly Darnius, Affriza Wahyu, Yousril Tasauva, Rahmat Rafinzar, M Arif Hidayatullah, Venny Rosiana, Sri Yunita Simanjuntak, Kiki Hardiyanti, Aji Rayi Purwasih, Indah Hapsari atas kebersamaan, motivasi, dan pengalaman menimba ilmu di MAP angkata 51 FISIP UNDIP, semoga kita semua sukses di jalan masing-masing sesuai cita-cita.

Peneliti berusaha menyusun tesis ini dengan sebaik-baiknya, namun peneliti sadar bahwa tesis ini banyak sekali kekurangan dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini, oleh karena itu besar harapan peneliti kepada para pembaca untuk dapat menyampaikan kritik dan saran yang bermanfaat. Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan rujukan ataupun penambah wawasan para pembaca. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 27 Juni 2023

Krisnaldo Triguswinri

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR RINGKASAN	v
LEMBAR ABSTRAK	vii
LEMBAR ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	5
1.2.a. Identifikasi Masalah	5
1.2.b. Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.5.a. Penelitian Terdahulu	7
1.5.b. Kajian Teori	11
1.6 Kerangka Pikir	12
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.a. Tipe Penelitian	13
1.7.b. Fokus Penelitian.....	15
1.7.c. Lokasi Penelitian	15
1.7.d. Fenomena yang diamati	15
1.7.e. Jenis dan Sumber Data	16

1.7.f. Instrumen Penelitian	16
1.7.g. Pemilihan Informan.....	17
1.7.h. Teknik Pengumpulan Data.....	17
1.7.i. Teknik Analisis Data.....	17
1.7.j. Uji Validitas Data	19
BAB II GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN	
2.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	20
2.2 Deskripsi Permendikbud No. 30 Tahun 2021	25
BAB III HASIL PENELITIAN	
1.3 Peran Komnas Perempuan Terhadap Kebijakan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi No. 30 tahun 2021	35
1.3.a Peran Sebagai Instrumen Komunikasi Untuk Pengambilan Keputusan	35
1.3.b Peran Sebagai Alat Penyelesaian Masalah.....	50
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
1.4 Peran Komnas Perempuan Terhadap Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi	63
1.4.a Peran Sebagai Instrumen Komunikasi Untuk Pengambilan Keputusan	63
1.4.b Peran Sebagai Alat Penyelesaian Masalah.....	68
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Table 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Sejak Tahun 2018 – 2021 Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan	3
Table 2 Perbandingan Penelitian.....	9
Table 3 Fenomena yang Diamati	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	13
Gambar 2 Teknik Analisis Data.....	18